

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak memiliki peran yang sangat besar untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah, usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Arum dan Zulaikha, 2012).

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2009). Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assesment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak (Mardiasmo, 2009). Sesuai dengan sistem *self assesment* maka wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak

untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Disamping melalui KPP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui *e-register*, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik *online* (Resmi, 2013).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, sebab selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta mendorong pertumbuhan ekspor. Pengelompokan jenis usaha ini berdasarkan definisi UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi yang notabene memiliki jumlah besar.

Hingga saat ini permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak tetap menjadi permasalahan dalam bidang perpajakan. Masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan pajak penghasilannya selama menjalankan usahanya. Rendahnya jumlah wajib pajak terdaftar di Indonesia juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan kepemilikan NPWP. Karena selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik (kontraprestasi) pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata dan hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak (Putri, 2012).

Banyak faktor yang diidentifikasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha kecil dan mikro dalam memiliki NPWP dari penelitian Priantara dan Supriyadi (2010) adalah faktor kebutuhan, kemudahan, sanksi, dan persepsi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan kepemilikan NPWP bagi WP OP di Pasar Menteng Pulo. Faktor-faktor kepatuhan yang mencerminkan aspek sikap dan perilaku tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun dan implementasi suatu strategi yang mampu mendorong para pedagang eceran atau pengusaha kecil memiliki NPWP. Jadi dapat diasumsikan bahwa semakin banyak WP yang melakukan kegiatan

usaha memiliki NPWP maka diharapkan terjadi peningkatan penerimaan negara (Priantara dan Supriyadi, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan Wirapati dan Jati (2014) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP di Kabupaten Gianyar yakni pemahaman WP terkait peraturan pajak, penghasilan WP, manfaat yang dirasakan jika memiliki NPWP, dan sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pengrajin dalam memiliki NPWP.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Priantara dan Supriyadi (2010) dan Wirapati dan Jati (2014). Penulis berusaha untuk melakukan replikasi terhadap kedua penelitian di atas dengan cara memilih beberapa variabel dari masing-masing penelitian tersebut dan menggabungkannya menjadi sebuah penelitian baru dengan objek penelitian berbeda yang dikhususkan pada pelaku UMKM. Penulis memilih variabel kebutuhan wajib pajak atas manfaat memiliki NPWP, kemudahan WP dalam urusan perpajakan, sanksi pajak bagi WP, persepsi WP terhadap pajak, pemahaman WP terhadap peraturan perpajakan dan pajak penghasilan WP didasarkan atas fenomena yang terjadi di lingkungan para pemilik UMKM. Sehingga diperkirakan keenam variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Penelitian ini bertujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya, apakah dengan menggunakan sampel dan periode yang berbeda akan dapat menghasilkan hasil yang konsisten dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Studi Empiris padaWajib Pajak UMKMd Kota Madiun).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah :

1. Apakah kebutuhanatas NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun?
2. Apakah kemudahan dalam perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun?
4. Apakah persepsi atas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun?
5. Apakah pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun?
6. Apakah penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menganalisa, mengetahui, serta membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kebutuhan wajib pajak atas NPWP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun.
2. Kemudahan dalam urusan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan signifikan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun.
4. Persepsi atas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun.
5. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun.
6. Penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP di Kota Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktik**

Manfaat dari penelitian ini yaitu agar pelaku usaha seperti UMKM mengerti dan paham betapa pentingnya memiliki NPWP.

## 2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian yang akan datang.

## 3. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini dapat memberikan bukti tambahan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan UMKM memiliki NPWP.

### **E. Sistematika Penulisan Laporan skripsi**

Sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, yaitu meliputi pengertian pajak, Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP), serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam memiliki NPWP.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan atau hasil penelitian.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.